

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana rakyat memilih pemimpinnya. Demokrasi di Indonesia di perlihatkan dengan adanya kegiatan pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota legislative dan presiden serta wakilnya yang diadakan serentak di seluruh Indonesia dan perwakilan yang ada di Luar Negri¹. Demokrasi di Indonesia juga terlihat dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung.

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu kegiatan politik yang paling banyak menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat sehingga pemilu menjadikan momen pendidikan politik yang sangat penting dalam rangka mendewasakan warga negara. Pemilu mengajarkan kepada masyarakat bagaimana terlibat pada pemilihan yang menjadi pilihannya. Pemilu merupakan momen yang sangat penting dalam proses demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis, maka pemilu sudah seharusnya di selenggarakan oleh suatu lembaga negara yang independen dan tidak memihak.

¹ Santoso, Topo 2007, *Hukum dan Proses Demokrasi : Problematika Seputar pemilu dan Pilkada*, Kemitraan, Jakarta, hlm. 47

KPU sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang ada, kode etik dan tata tertib KPU. KPU juga memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum sehingga penyelenggaraan sebuah pemilihan umum dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.

Pada bagian ini akan mengolaborasi empat tahapan pemikiran pemikiran Pertama, konsep/teori tentang demokrasi serta nilai ideal yang terkandung didalamnya. Kedua, sejarah perkembangan adopsi konsep demokrasi dalam system hukum dan politik di Indonesia. Ketiga, problem teoritik implementasi kebijakan public dan di atas, khususnya bagaimana implementasi kebijakan konstitusi demokrasi. Keempat, diskusi tentang implementasi kebijakan Pilkada Langsung sebagai bagian dari instrumentalisasi demokrasi. Secara spesifik penelitian ini akan mengambil studi kasus pada suatu strategi dalam mengatasi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah di hadapi oleh KPU kota Malang. Komisi Pemilihan Umum termasuk lembaga yang independen dalam penyelenggaraan pemilihan umum, juga memiliki tugas untuk membuat suatu perbedaan dalam hasil politik yaitu menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas.

Republik Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi sejak kelahirannya telah menyelenggarakan beberapa kali pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota legislative dan dua kali pemilihan presiden dan wakil

presiden yang diselenggarakan secara langsung. Berlangsungnya pemilu ini menjadi semakin sering karena dengan ditetapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung maka gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pun juga di pilih secara langsung melalui pemilu. Semakin sering negara kita menyelenggarakan pemilu bukan berarti permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu itu semakin berkurang. Karena menurut fakta yang telah dihimpun oleh Widjojanto bahwa permasalahan dalam pemilu sangat beraneka ragam yang akhirnya banyak pihak yang membawa keranah hukum dan menjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).²

Pada permasalahan yang tengah dihadapi oleh KPU dalam teknis dan mekanisme pembentukan DPT ialah adanya pemilih ganda serta adanya masyarakat yang sudah meninggal namun masih terdata menjadi pemilih dalam pilkada tahun 2018, permasalahan tidak sampai disini saja adapun dari beberapa mekanisme yang kurang sinkron dengan dispendukcapil dalam hal tersebut data-data masyarakat sebelumnya langsung dari data Kemendagri atau langsung dari pusat, namun dari pihak KPU masih bekerjasama dengan dispendukcapil. Dalam permasalahan mekanisme pada saat pendataan DPT banyaknya masyarakat yang pindah di satu tempat atau masyarakat yang sudah pindah masih banyak yang belum melaporkan kepada RT RW setempat sehingga pada saat pendataan panitia KPU atau PPS masih merasakan kesulitan sehingga data yang sebenarnya harus di peroleh dalam setiap masyarakat masih belum bisa dikatakan akurat di karena adanya warga yang sudah pindah atau yang masih berdomisili belum melaporkan kepada RT RW setempat.

² Ali Rokhman, (2011) *Prospek Penerapan E-Voting Di Indonesia Sebagai terwujud Demokrasi Yang Mensejahterakan Masyarakat*. Hal 23

Pada penelitian terdahulu mengungkapkan banyaknya perselisihan dalam pemilu di antaranya disebabkan oleh factor yang meliputi beberapa kesalahan, banyak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih. Permasalahan ini sangat mengemuka pada pemilu tahun 2009 terutama pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Banyak terjadi kasus penduduk yang sudah meninggal dunia masih tercatat dalam daftar pemilihan, dan sebaliknya penduduk asli yang telah berdomisili lama disuatu desa ternyata tidak tercatat dalam daftar pemilih, atau sangat mungkin seorang pemilih tercatat dalam daftar pemilih sebagai daftar pemilih pada lebih dari suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS)³.

Permasalahan ini muncul karena system informasi kependudukan yang masih belum berjalan dengan baik. Fenomena penggunaan kartu identitas ganda juga menyebabkan banyaknya pemilih yang miliki kartu suara lebih dari satu buah. Keadaan ini seringkali di manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan jumlah suara sehingga dapat menjadi sarana untuk menang dalam pemilu. Ketika pemungutan suara banyak pemilih yang melakukan kesalahan dalam memberi tanda pada kertas suara akhirnya banyak kartu suara yang dinyatakan tidak sah, Proses pengumpulan kartu suara yang berjalan lambat, karena perbedaan kecepatan pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing daerah. Hal ini di tambah dengan kondisi geografis negara kita yang heterogen sehingga dapat menghambat distribusi kartu suara. Proses penghitungan suara yang dilakukan di setiap daerah juga berjalan lambat karena proses tersebut harus menunggu semua kartu suara terkumpul terlebih dahulu. Keterlambatan yang

³Alim Mustofa, 2015, Tesis: *"Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Implementasi Kebijakan Verifikasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012)"*, Universitas Brawijaya

terjadi pada proses pengumpulan, akan berimbas kepada proses penghitungan suara.

Keterlambatan proses pengiriman hasil perhitungan suara, hal ini disebabkan oleh masih lemahnya infrastruktur teknologi komunikasi daerah. Oleh karena itu, seringkali pusat tabulasi harus menunggu data perhitungan yang dikirimkan daerah dalam jangka waktu yang lama. Akibat dari hal tersebut, maka pengumuman hasil pemilu akan memakan waktu yang lama. Sangat mungkin terjadi “jual beli” kertas suara demi kepentingan partai tertentu secara sistematis dan terselubung.

Didalam tudingan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara mempunyai peran penting dalam menyelesaikan hal tersebut sebagaimana dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum melakukan bentuk strategi dalam upaya mengatasi permasalahan data saat di lapangan yaitu melakukan bentuk supervise dimana supervise ini dilakukan oleh petugas Petugas Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk langsung oleh Komisi KPU Kota Malang.

Dalam implementasinya, demi terwujudnya demokrasi, maka dibutuhkan prasyarat melalui penerapan beberapa kriteria seperti akuntabilitas, pergantian kekuasaan, rekrutmen politik terbuka, pemilihan umum (pemilu) dan suatu ruang bagi warga negara akuntabilitas hak-hak dasarnya. Kriteria demikian sebagai salah satu factor yang mempengaruhi arah pembangun demokrasi suatu negara, yaitu apakah penyelenggaraanya berjalan sesuai dengan kehendak rakyat atau tidak.

Sebagai produk kebijakan public, pelaksanaan Pemilihan daerah secara langsung tentunya diharapkan dapat berjalan dengan baik. Sehingga, apa yang terjadi cita-cita kebijakan tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Salah satu masalah implementasi kebijakan pemilu adalah yang kerap muncul adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang banyak mengalami kesalahan. Permasalahan ini tidak saja terjadi di

satu kabupaten/kota melainkan hampir diseluruh kabupaten/kota di Indonesia⁴. Kesalahan kecil dalam penyusunan DPT akan berdampak besar pada keberhasilan Pemilu dan penegakan nilai demokrasi. Sebab, kesalahan dalam DPT dapat membuat hak konstitusional warga negara menjadi hilang. Hilangnya hak konstitusional ini jelas merupakan reduksi yang sangat besar dari nilai demokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, verifikasi data mutlak diperlukan untuk menjamin tidak hanya keberhasilan pemilu, tetapi juga penegakan demokrasi. Dengan diadakan verifikasi data diharapkan Data Pemilih (DPT) menjadi akurat dan warga masyarakat tidak ada yang merasa hak pilihnya terabaikan.

Untuk menjamin hak konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam pemilu, maka pemutakhiran data pemilih harus dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan pantarlih secara bersenjang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pemilu bahkan secara teknis diatur dengan peraturan KPU nomer 9 Tahun 2013 tentang penyusunan Daftar Pemilih Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam konteks pemilu pada kota Malang, Akten yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan data pemilih secara bersenjang dari KPU Kota Malang, Panitia pemilihan kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran data pemilih di tingkat paling bawah serta unsur panitia pengawas pemilu selaku pengawas secara berlangsung terhadap proses pelaksanaan penyusunan data pemilih. Khusus PPDP biasanya PPS merekrut dari pengurus Rukun Tetangga (RT) dari wilayah Rukun Warga setempat, hal ini dimaksudkan agar pendapatan pemilih dapat dilaksanakan secara optimal dan akurat⁵.

Dalam hal pendapatan dan pemutakhiran data pemilih, kendala dan permasalahan yang terjadi adalah tidak tidak akuratnya data pemilih, yang

⁴Rian diliyatna, *Pemilu Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap* <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/nasional/> diakses 7 desember

⁵ peraturan KPU nomor 9 Tahun 2013 tentang penyusunan Daftar Pemilih Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

disebabkan tidak jelasnya mekanisme pendataan dan pemuktahiran data pemilih tersebut. Mekanisme penyusunan daftar pemilih pemilukada diawali dengan penerimaan data penduduk yang telah mempunyai hak pilih yaitu dengan penerimaan data penduduk yang telah mempunyai hak yaitu dari pemerintah daerah yang didalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) oleh KPU Kota Malang. Sesuai dengan syarat-syarat sebagai pemilih (sudah berusia 17 tahun atau sudah kawin/ pernah kawin dan tinggal disuatu daerah minimal 6 bulan sebelum Pilkada)⁶. Penyusuna DP4 yang terlambat juga di tengerai bahwa DP4 yang disusun oleh Dispendukcapil kurang valid datanya, dimana banyak penduduk yang mempunyai hak pilih tidak masuk dalam daftar demikian juga adanya penduduk yang tidak mempunyai hak memilih justru masuk dalam daftar pemilih. Sementara itu, data pemilih yang telah diisi oleh masyarakat karena sesuatu dan lain hal banyak yang tidak terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU Kota Malang. Berdasarkan data yang didapatkan dari KPU Kota Malang Sebagai berikut:



“Dalam suatu permasalahan yang tergan di hadapi oleh KPU Kota Malang Sebanyak 1.838 nama warga Kota Malang yang masuk daftar pemilih sementara (DPS) tak mungkin bisa mencoblos di ajang Pilwali 27 Juni 2018. Karena dari proses verifikasi yang dilakukan diketahui jika nama-nama tersebut tak masuk database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang. Hampir dua ribu nama yang dicoret itu terungkap saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang meminta tanggapan masyarakat dengan menyebar DPS. Sebanyak 1.838 nama itu muncul dari tahapan pendataan daftar pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP. Munculnya angka 1.838 nama itu dari hasil pencermatan dispendukcapil dari pendataan terhadap 13.179 data warga

⁶ Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

yang belum melakukan perekaman per Desember 2017. Angka tersebut ada di dalam 605.081 DPS hasil rekapitulasi pleno KPU⁷.

Berikut ini adalah DP4 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 :

Tabel: DP4 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BLIMBING	70.198	73.305	143.403
2	KEDUNGKANDANG	75.578	77.288	152.866
3	KLOJEN	41.175	44.076	85.251
4	LOWOKWARU	61.396	63.552	124.748
5	SUKUN	76.038	77.538	153.576
JUMLAH		304.385	335.459	659.844

Sumber: KPU Kota Malang

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas tentang pentingnya keikutsertaan warga negara dalam memilih pemimpin sangat mutlak di perlukan. Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi KPU Kota Malang dalam Mengatasi Problematika Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Pemilukada Kota Malang dan upaya mengurangi permasalahan Pemilukada Kota Malang dengan melakukan verifikasi DPT.

⁷Samsul arif, *sedikit masalah dalam daftar pemilih KPU terus meninjau* <https://radarmalang.id/tetapkan-dpt-kpu-kota-malang-coret-1-838-pemilih/> di akses 8 desember 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana Strategi KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Malang dalam Menyelesaikan Permasalahan Penyusunan Daftar Pemilih (DPT)?
2. Apa kendala-kendala KPU Kota Malang dalam Menyelesaikan Permasalahan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di angkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dalam menyelesaikan Problematika Penyusunan Daftar Pemilih (DPT).
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala KPU Kota Malang dalam menyelesaikan Problematika Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan untuk menambah ilmu pengetahuan untuk menjelaskan dan meningkatkan makna partisipasi politik dan Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dalam mengatasi problematika daftar pemilih tetap (DPT), Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengetahuan dan bacaan serta refrensi untuk penelitian selanjutnya.



2. Manfaat Praktis

Bagi Lembaga Pemerintah dalam hal ini KPUD Kota Malang, agar nantinya peneliti ini dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah serta mampu menjadi acuan dalam program yang berkaitan.

E. Definisi Konseptual

Definisi konsep yang bermanfaat adalah konsep yang dibentuk menjadi keterangan sebagai kebutuhan untuk menganalisa dan penyusunan dari tujuan penelitian. Dalam penelitian-penelitian ilmu sosial, konsep-konsep digunakan untuk membuat abstraksi-abstraksi umum. Konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap suatu yang khas.

Dalam penelitian ini konsep yang digunakan oleh peneliti adalah konsep penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa hasil penelitian. Agar dapat memperoleh kejelasan tentang arti dari penelitian ini diperlukan adanya definisi konsep yang memberikan arahan dan ruang lingkup penelitian sehingga mempermudah dalam penelitian dengan memperhatikan judul dari penelitian, maka konsep-konsep yang dijabarkan kedalam definisi konsep adalah:

1. Strategi

Strategi merupakan bentuk implementasi pelaksanaan yang di atur dalam manajemen yang baik guna mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya dalam mengatasi persoalan, adapun menurut Rosady Ruslan (2005) mengemukakan bahwa :

“strategi itu pada hakekatnya adalah suatu perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktek oprasioanalnya”.

Sedangkan menurut Ahli sosiologi Philip Selznick dalam Husain Umar (1999) mengatakan bahwa strategi yang baik adalah strategi yang memuat nilai-nilai para anggotanya sehingga mereka merasa terikat dengan tujuan perusahaan dan dapat menjadikan dorongan semangat secara terus-menerus bagi anggotanya.

2. KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga independen penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, seperti yang tercantum dalam,

“pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu”

Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya. Ketetapan yang melahirkan komisi pemilihan umum (KPU) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPUP).

3. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA atau Pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah

yang antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

“Merujuk kepada UU No.32 Tahun 2004 maka peserta pilkada adalah pasangan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun ketentuan ini berubah dengan diterbitkannya UU No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga bisa saja berasal dari pasangan calon perseorangan yang hanya didukung oleh sekelompok orang”

Maka dari itu proses Pemilihan Kepala Daerah (baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota) dalam lingkup wilayah atau kawasan tertentu yang dilakukan secara serentak/dalam waktu yang bersamaan.

4. Problematika (Permasalahan)

Pengertian Problematika Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah yang telah dihadapi ketika suatu perilaku itu membuat suatu kesalahan atau kegagalan yang bersifat objectif.

Menurut prayitno (1989) mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan.

“Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan⁸. Sedangkan ahli lain mengatakan menyatakan bahwa "definisi problema/problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu”.

Jadi, problema adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individu Tuan Guru (faktor

⁸ Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintang, 2002, hal. 276)

eksternal) maupun dalam upaya pemberdayaan masyarakat Islami secara langsung dalam masyarakat.

5. DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Daftar pemilih tetap (DPT) merupakan Daftar nama dan identitas penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih tetap berdasarkan Undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suaranya di TPS dalam pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD kabupaten/Kota/DPRK.

“Adapun Undang-Undang yang mengatur daftar pemilih tetap (DPT) terdapat dalam Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota⁹. Di dalam PKPU juga dipaparkan bahwasanya pemilih itu adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah yang terdaftar dalam pemilihan.”

Dalam menggunakan hak suara yang kita miliki maka kita harus terdaftar sebagai pemilih. Untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar menjadi pemilih tetap atau tidak, kita dapat mengeceknya di laman situs KPU di www.kpu.go.id. ketika sudah masuk di laman situs KPU lalu pilih "Data Pemilih Tetap" yang berada di pojok kanan atas laman utama KPU ini dan masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP. Jika sudah terdaftar menjadi pemilih tetap (DPT) maka nama, tempat tinggal dan TPS tempat kita mencoblos akan tertera di laman KPU tersebut. Apabila nama kita tidak terdaftar menjadi pemilih tetap, kita dapat mendaftar untuk menjadi pemilih tambahan (DPTb) di laman situs KPU.

⁹ Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota


Mendaftarkan diri untuk menjadi pemilih tetap dan terdaftar menjadi pemilih tetap untuk memberikan hak suara kita merupakan salah satu partisipasi kita sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Partisipasi warga masyarakat merupakan faktor terpenting bagi sukses tidaknya penyelenggaraan pesta demokrasi.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah merupakan penjelasan bagaimana variable-variabel akan di ukur dengan adanya konsep operasional maka akan mempermudah peneliti yaitu dengan cara memberi parameter-parameter dan indikator-indikator dari variable yang diteliti¹⁰. Berikut operasional variable peneliti ini:

1. Strategi KPU Kota Malang dalam Mengatasi Problematika

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- 
- a. Melakukan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Secara Berskala
 - b. Melakukan Supervisi (Monitoring)
 - c. Meningkatkan Kordinasi PPS dengan RT RW Setempat
 - d. Sosialisasi PPS dengan RT RW

2. Kendala-kendala atau Hambatan KPU Kota Malang Dalam Mengatasi Problematika Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- b. Minimnya Kedisiplinan Warga dalam Administrasi Kependudukan Kota Malang

¹⁰ Masri Sanngarimbun & Efendi Sofian, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, Hlm. 34

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai urutan langkah-langkah untuk melaksanakan penelitian¹¹. Dengan kata lain, metode penelitian merupakan langkah sistematis dalam mendapatkan informasi sesuai dengan tema penelitian

Berikut uraian dari metode yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mengarah pada pemberian data secara sistematis dan akurat terkait kondisi di lapangan¹².

Dimana peneliti ini akan menggambarkan hasil penelitian atau fenomena-fenomena yang diteliti, kemudian di gambarkan kedalam bentuk uraian-uraian yang menunjukkan bagaimana Strategi KPU Kota Malang dalam mengatasi problematika Daftar Pemilih Tetap (DPT).

2. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian adalah orang yang diminta keterangan dan informasi terkait pembahasan penelitian. Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *purposive sampling* yang didasarkan pada tujuan atau keperluan yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling mengetahui tentang apa saja yang di harapkan sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang sedang diteliti¹³. Adapun yang menjadi subyek Sumber data Primer dalam penelitian ini ialah :

- a. Komisi KPU Kota Malang

¹¹ Zuriah, Nurul. *Op,ct* Hlm. 227.

¹² *Ibid*, Hlm.47.

¹³ Sugiyono.2012, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 96.

- b. Bawaslu Kota Malang
- c. Petugas Pemungutan Suara (PPS)
- d. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP)

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan problematika daftar pemilih tetap. Peneliti menggunakan sumber data yang didasarkan pada klasifikasi sumber datanya, yakni:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya¹⁴. Dengan kata lain, data primer didapatkan peneliti pada saat turun ke lapangan. Sebagaimana data primer yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan informasi perihal Strategi KPU Kota Malang dalam Mengatasi Problematika Daftar Pemilih Tetap (DPT

4. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua (buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen dan lain-lain).¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

¹⁴ Waluya, Bagja, 2007, *Sosialisasi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, PT Setia Purna Inves, Bandung, Hlm.79.

¹⁵ *Ibid*

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada obyek lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.¹⁶.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan penelitian untuk menggali informasi terkait Strategi KPU Kota Malang dalam meningkatkan partipasi politik kepada masyarakat. Sebagaimana tujuan dari wawancara menurut Estrberg yakni pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat yang dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu¹⁷. Adapun yang menjadi informan Sumber Data Primer dalam penelitian ini ialah:

1. Komisioner KPU Kota Malang, Yaitu Bapak Deni (Divisi Data)
2. Bawaslu Kota Malang
3. Masyarakat (tambahan pemilih pasca pemuktahiran data)

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan buku, surat, transkrip, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.

¹⁶ Margono, S. 1997, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 187.

¹⁷ Sugiyono, *op.cit*, Hlm. 316.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kota Malang.

7. Teknik Analisa Data

Dengan data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai. Menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

